

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Bisa disimpulkan bahwa muatan multikultural dalam mata pelajaran sejarah tingkat SMA berdasarkan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 mengalami peningkatan, terutama pada materi Sejarah Indonesia kelas XI. Kesimpulan ini diambil peneliti berdasarkan hasil dari pengkajian masing-masing materi dalam tiap-tiap kurikulum. Analisis ini juga dilakukan berdasarkan silabus, RPP, buku paket sejarah peserta didik dan metode pembelajaran pada kurikulum yang berlaku.

Pada sisi materi pembelajaran, Kurikulum 2006 sarat dengan aspek kognitif. Hal ini berbeda dengan Kurikulum 2013 yang materi pelajarannya terintegrasi dengan nilai sikap spiritual, sosial, dan keterampilan sehingga muatan multikultural lebih terlihat jelas pada Kurikulum 2013.

Muatan multikultural dalam Kurikulum 2006 baru terlihat pada kelas XI program IPA dan IPS dalam materi Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia. Sedangkan pada Kurikulum 2013 muatan multikultural mulai terlihat di kelas X semester 2 (genap) Sejarah Indonesia dengan materi yang sama.

Materi yang bermuatan multikultural lebih banyak terdapat di kelas XI. Pada kurikulum Kurikulum 2006 kelas XI IPA, materi yang memiliki muatan multikultural terdapat pada materi yang mencakup Teori masuknya agama dan budaya Hindu-Budha, Perkembangan Agama dan Kebudayaan Hindu-Budha di

Indonesia, Kerajaan-Kerajaan Hindu-Budha di Indonesia (Tarumanegara, dan Sriwijaya), Indische Partij, Kongres Pemuda, dan perumusan teks proklamasi.

Untuk program IPS kelas XI, muatan multikultural terdapat pada teori masuk agama dan kebudayaan Hindu-Budha di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia (kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno dan Tarumanegara), teori Alwi Shihab tentang masuknya agama Islam di Indonesia, Kerajaan Banten, interaksi dan akulturasi budaya Hindu-Budha dan Islam, transformasi sosial dengan kesadaran dan pergerakan kebangsaan (Indische Partij, kongres wanita, kongres pemuda).

Pada materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Kurikulum 2006 tidak semua materi memiliki kandungan multikultural. Kerajaan-kerajaan besar Indonesia yang dikenal sebagai kerajaan emporium ternyata tampil dengan tidak memiliki kandung muatan multikultural. Kerajaan Kediri, Singhasari, dan Majapahit tidak terlihat memiliki kandungan multikultural padahal dalam sejarahnya ketiga kerajaan besar ini memiliki berbagai karya sastra yang mendapat pengaruh dari India. Selain materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Budha, pada materi pada masa VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga tidak memiliki kandungan multikultural.

Muatan multikultural pada kelas XII dapat ditemukan pada program IPA dan pada program IPS dengan materi pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman wahid atau Gus Dur dimana pada 1 Januari 2000 Gus Dur mengembalikan nama Papua sekaligus menyetujui simbol kultural bendera Bintang Kejora dikibarkan di

tanah Papua. Pada tingkat ini, materi yang bermuatan multikultural tidak terlihat pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Pada Kurikulum 2013, materi yang bermuatan multikultural di kelas X pada dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia mencakup materi teori-teori masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia (Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Singhasari, Kerajaan Majapahit),

Pada kelas XI muatan multikultural terdapat pada materi penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa Spanyol dan Belanda ke Indonesia, Kesultanan Banten dalam perdagangan internasional, Kesultanan Goa, perkembangan agama Kristen, peranan orang-orang Cina melawan VOC, pers pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Budi Utomo, Indische Partij, kedatangan Jepang di Indonesia, perumusan teks proklamasi, Piagam Jakarta.

Pada Sejarah Peminatan umumnya materi yang bermuatan multikultural sama dengan materi kelompok IPS pada kurikulum Kurikulum 2006. Hal ini karena buku paket yang dipakai oleh peserta didik pada Sejarah Peminatan sama dengan buku paket program IPS yang digunakan dalam Kurikulum 2006. Diantaranya materi yang bermuatan multikultural terdapat pada materi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha (Kerajaan Sriwijaya, Mataram Kuno dan Tarumanegara), Kerajaan Banten, Indische Partij, kongres pemuda, dan kongres wanita.

Bisa dipahami bahwa Kurikulum 2013 didesain untuk memperkuat keindonesiaan karena penggagas kurikulum ini menyadari bahwa Indonesia

merupakan negara yang memiliki berbagai latar belakang kultural dan subkultural. Muatan multikultural tercermin dalam buku-buku paket untuk mendukung pelajaran sejarah. Materi bermuatan multikultural yang terlihat sangat signifikan berbeda antara Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 adalah dimuatnya secara gamblang tentang perkembangan agama kristen dan peranan orang-orang Cina melawan VOC. Pada kurikulum-kurikulum sebelumnya materi ini tidak terlihat di buku paket mata pelajaran sejarah yang menjadi bacaan wajib siswa.

Pada penerapannya, umumnya guru mengetahui konsep multikultural. Terutama pada kurikulum 2013 yang secara gamblang memaparkan tentang multikultural. Saat materi yang sedang dipelajari memiliki muatan multikultural, guru akan menyampaikan kepada peserta didik. Namun penyampaiannya tidak dilakukan secara langsung dengan menggunakan konsep multikultural karena dikhawatirkan akan membuat peserta didik bingung. Guru akan menyampaikan materi dengan lebih menekankan pada proses interaksi masyarakat yang berbeda budaya, terbuka, toleran, dan setara. Seperti pada materi tentang akulturasi budaya pada masa Hindu-Budha dan Islam akan dipaparkan tentang berbagai peninggalan dan latar belakang dari peninggalan-peninggalan tersebut yang memiliki lebih dari satu unsur budaya.

Ada atau tidaknya muatan multikultural dalam buku paket peserta didik tergantung dari pemahaman dan sudut pandang penulis buku paket. Jika penulis memiliki pemahaman yang baik tentang multikultural, terutama multikultural dalam sejarah Indonesia, maka muatan multikultural yang ada di

dalam sejarah akan ditampilkan untuk memberikan pemahaman mengenai multikultural dalam bentuk kesejarahan kepada peserta didik.